

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perpustakaan dapat diartikan sebagai sumber belajar masyarakat. Setiap bahan bacaan yang dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan dalam bentuk implementasi nyata yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perpustakaan yang tersedia hendaknya berfungsi melayani masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang dikarenakan oleh faktor geografis juga berhak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan secara khusus. Oleh sebab itu, keberadaan perpustakaan harus merata di berbagai tingkat daerah di Indonesia.

Rencana pembangunan jangka panjang 2010-2014 di bidang perpustakaan pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia salah satunya menetapkan kebijakan pembangunan perpustakaan dengan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat dan upaya tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-undang yang menyebutkan bahwa pemerintah baik di Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menghasikan

rencana strategis guna melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perpustakaan memiliki tantangan ke depan untuk dihadapi. Tantangan tersebut salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pembinaan dan pengembangan atas penyelenggaraan semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan Induk/Umum di Kecamatan/Desa/Kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan tempat ibadah dan perpustakaan masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul secara efektif, sehingga pencapaian pemerataan layanan perpustakaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi yang bersumber dari bahan bacaan dan sumber-sumber informasi lainnya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dimana pada akhirnya tujuan pembangunan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memiliki daya saing dapat terwujud.

Salah satu perpustakaan yang mendapat program pembinaan perpustakaan guna mengembangkan perpustakaan di wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah perpustakaan desa. Perpustakaan desa adalah perpustakaan rakyat sebagai salah satu aspek dari pada urusan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 (LN Nomor 64 Tahun 1956) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951 (LN Nomor 110 Tahun 1951) sebagai urusan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah. Perpustakaan desa berperan dalam menyediakan kebutuhan informasi masyarakat, memperbaiki kesejahteraan

masyarakat di sekitarnya, menyediakan buku-buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat dan anak-anak di berbagai bidang serta untuk menggalakkan minat baca masyarakat, sehingga mereka menggunakan waktu luang untuk membaca.

Berbagai cara digalakkan oleh pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) dalam program pembinaan perpustakaan desa. Namun yang sering menjadi persoalan adalah seberapa efektif program tersebut bagi peserta program dan pihak KPAD sendiri. Program pembinaan yang efektif adalah program pembinaan yang dapat dikatakan berhasil. Program pembinaan dapat dikatakan berhasil apabila peserta program mampu mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat menerapkan keahlian barunya dalam tugas-tugasnya sehingga menjadi peningkatan kinerja, baik kinerja individu atau organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu pilar penting dalam suatu organisasi profit atau pun non profit seperti halnya perpustakaan desa, sehingga aktivitas-aktivitas sebagai wujud program pembinaan bertujuan untuk memotivasi SDM yang menjadi penggerak untuk mengembangkan perpustakaan desa secara berkelanjutan dalam melayani masyarakat, disini adalah masyarakat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sudah diselenggarakan perpustakaan desa.

Indonesia saat ini belum punya visi untuk mencerdaskan bangsa melalui perpustakaan. Setidaknya itulah kesimpulan dari hasil Rapat Koordinasi yang diadakan di Denpasar Bali bulan September 2012 dengan tema “Menuju Desa Cerdas: Optimalisasi Pemberdayaan Perpustakaan Desa.” Dalam Rapat Koordinasi tersebut salah seorang anggota DPR mengharapkan agar hasil dari pertemuan tersebut

dapat menghasilkan pemetaan terhadap berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diangkat dalam rangka memajukan perpustakaan di desa. Dalam sambutan Kepala Perpustakaan Nasional, Sri Sularsih menyampaikan bahwa salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa adalah bagaimana tingkat kecerdasan masyarakat sampai ke pelosok desa. Untuk itu perpustakaan berperan penting dalam memenuhi indikator tersebut. “Maka kita semua sepakat bahwa perpustakaan harus dibangun ke seluruh pelosok desa di Indonesia.” Sri menambahkan untuk masalah dana, tantangan geografis dan keberagaman budaya di Indonesia merupakan hal yang perlu dicarikan solusinya bersama.

Menurut Plt. Deputi Pengembangan Sumber Perpustakaan Dedi Junaedi, jumlah desa yang ada saat ini di Indonesia adalah sekitar 76.000 desa. Dari jumlah tersebut baru 21.281 desa yang sudah memiliki perpustakaan, itupun baru 40% yang bisa dikatakan berkualitas baik. Adanya hal tersebut Perpustakaan Nasional menargetkan antara tahun 2010-2014 paling tidak 50% dari keseluruhan desa yang ada di Indonesia sudah memiliki perpustakaan.

Pendapat di atas didukung oleh pernyataan dari Sindo News (2014) yang menyebutkan di daerah Karanganyar, nasib perpustakaan desa cukup memperhatikan karena di daerah tersebut minim akan dukungan dan tidak ada standar yang ditetapkan. Jumlah perpustakaan desa 3% dari 177 desa/kelurahan yang ada. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mengatakan bahwa mayoritas desa belum memiliki perpustakaan. Hal ini terjadi karena beberapa kendala yakni perlu adanya tempat yang permanen, jumlah koleksi buku 1000 eksemplar, dukungan

anggaran desa dan pengelolaan berkesinambungan. Kenyataan di lapangan membuat pihak KPAD Karanganyar memberdayakan perpustakaan keliling untuk memenuhi hasrat membaca masyarakat.

Irkham (2012) menambahkan bahwa bukan hanya masalah jumlah koleksi saja yang menjadi masalah, tetapi Irkham dalam artikelnya yang berjudul Esensi Perpustakaan Desa menyatakan “Jika mayoritas masyarakat bermata pencaharian petani, maka lengkapi perpustakaan dengan bacaan tentang pertanian.” Hal ini berarti bahwa pihak pemangku kebijakan lebih selektif dalam memberikan bantuan buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar melalui kegiatan perpustakaan desa bisa menjadi sarana masyarakat sekitar meningkatkan kesejahteraan ekonominya karena kesesuaian dari koleksi perpustakaan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, minimal ada tiga faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa. pertama; tempat atau lokasi, kedua; koleksi dan petugas, ketiga; kegiatan perpustakaan desa.

Data yang diperoleh dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Gunung Kidul didapati jumlah perpustakaan desa di wilayah kabupaten Gunung Kidul berjumlah 114 perpustakaan desa yang tersebar di 110 desa di kabupaten Gunung Kidul dimulai sejak awal tahun 2009 sampai 2014. Perpustakaan desa dalam pembentukannya juga bertujuan untuk mendekatkan buku atau koleksi non buku sebagai bahan atau sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Daerah-daerah pelosok yang sulit terjangkau karena terkendala jarak dan waktu serta biaya sulit untuk menjangkau perpustakaan daerah kabupaten. Jumlah mobil perpustakaan

keliling yang terbatas serta personil yang terbatas menjadi kendala karena jumlah lokasi yang harus dijangkau tidak sebanding dengan armada dan personil yang tersedia. Sehingga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Wonosari melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan program pembinaan-pembinaan ke semua jenis perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas, perpustakaan tempat ibadah dan perpustakaan desa.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Wonosari melaksanakan fungsinya dengan melakukan pembinaan ke setiap perpustakaan yang tersebar di wilayah Gunung Kidul, termasuk perpustakaan desa. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembinaan di semua perpustakaan desa yang sudah dilakukan pemetaan dan survey sebelumnya dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa yang telah di data untuk dibentuknya perpustakaan desa. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Wonosari bertujuan untuk memotivasi dan mengembangkan perpustakaan desa agar berkelanjutan dalam melayani masyarakat.

Wujud dari pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Wonosari antara lain stimulasi yang berbentuk barang, pembinaan langsung ke lokasi perpustakaan desa, bimibingan teknis, evaluasi dengan lomba perpustakaan desa, serta mengikutsertakan peserta pembinaan dalam acara seminar, workshop dan pelatihan. Dalam hal stimulasi dilakukan pada awal terbentuknya perpustakaan, kemudian dilakukan pembinaan langsung ke lokasi dengan melakukan pembinaan langsung dalam hal pengolahan koleksi, bagaimana

melayani pengguna dari hal-hal yang bersifat teknis, kemudian ada juga bimbingan teknis, mengikutsertakan peserta pembinaan dalam pelatihan, seminar atau workshop serta adanya lomba perpustakaan desa. Setiap organisasi, program atau kegiatan memiliki kendala yang berbeda-beda dalam proses pelaksanaannya, dalam program pembinaan perpustakaan desa ini kendala yang didapat adalah salah satunya kurang adanya komitmen dari pihak perpustakaan desa untuk mengembangkan perpustakaan desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Rudi Antoni pada tahun 2009 yang berjudul *Fakta Sosial pada Program Pembinaan Perpustakaan Desa* memaparkan fakta-fakta sosial yang terjadi pada proses implementasi program pembinaan perpustakaan desa yang dilaksanakan oleh pihak Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini lebih menekankan pada realitas-realitas dan fakta-fakta sosial yang ada selama adanya program pembinaan perpustakaan desa dari kacamata petugas perpustakaan desa sendiri. Hasil penelitian tersebut meliputi bahwa adanya pembinaan perpustakaan desa yang dilakukan sudah cukup baik, tetapi dalam hal implementasi atau praktek dari program pembinaan tersebut kurang baik karena adanya kekurangan-kekurangan yang bisa menyebabkan sebagian perpustakaan tidak beroperasi seperti tidak ada tindak lanjut ke depan bagi perpustakaan yang telah mendapatkan bantuan.

Efektivitas merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah program atau kegiatan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan awal yang akan dicapai oleh suatu organisasi, yakni Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Wonosari. Berdasarkan pengukuran indikator-indikator akan dihasilkan apakah program pembinaan perpustakaan desa yang dilakukan oleh perpustakaan sudah efektif atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan tujuan pembentukan serta pembinaan yang diaparkan di atas dapat dilakukan pengujian dari efektivitas program pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Gunung Kidul dimana penelitian ini untuk mengetahui apakah program pembinaan perpustakaan desa yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2009 sampai saat ini sudah efektif atau belum.

Letak geografis gunung kidul yang lebih banyak terdiri dari bukit, jumlah tenaga pustakawan dan armada yang kurang memadai serta banyaknya perpustakaan-perpustakaan yang menjadi binaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Wonosari mendorong penulis untuk melihat sejauh mana efektivitas program pembinaan perpustakaan desa yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Daerah Gunung Kidul, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal pembentukan dan pembinaan perpustakaan desa atau belum, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pembinaan Perpustakaan Desa Oleh Perpustakaan Daerah Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas program pembinaan

Perpustakaan Desa yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunung Kidul?.”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program pembinaan Perpustakaan Desa di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis dan teoritis. Manfaat-manfaat tersebut meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritik**

Manfaat penelitian ini secara teoritik yaitu bisa dijadikan sebagai wacana ilmiah sebagai suatu metode mengembangkan suatu organisasi, khususnya metode pengembangan pada organisasi non profit yang bergerak pada bidang pelayanan jasa informasi (perpustakaan).

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini bisa menjadi sebuah bahan masukan untuk mengembangkan penelitian di bidang informasi dan perpustakaan secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pemberian informasi yang nantinya dapat dijadikan masukan dalam membuat kebijakan atau program kerja untuk meningkatkan kualitas perpustakaan desa dalam memberikan jasa pelayanan informasi bagi publik yang lebih

berorientasi kepada kepentingan pengguna dan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai program-program yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah, khususnya program pembinaan Perpustakaan Desa.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Efektivitas**

Di dalam pelaksanaan sebuah program, efektivitas sangat diperlukan karena efektivitas secara umum menunjukkan pada hasil yang dicapai. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan tercapai dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka akan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sehingga semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan.

Pendapat lain dari Steerts (1985) juga mengemukakan tentang efektivitas dan menyatakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu guna memenuhi tujuan serta sasaran tanpa melumpuhkan dan memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Hal yang serupa juga dikemukakan Kurniawan (2005) dalam bukunya *Tranformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang di dalamnya tidak ada tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Teori efektivitas juga diungkapkan oleh Etzioni (1985) dalam Makmur (2008) menyatakan bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Berdasarkan pendapat ini, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai sasarnya.

Banyaknya pengertian dari efektivitas dari beberapa ahli, Miller memaparkan bahwa:

*“effectiveness be define as the degree to which a social system archive its goals, effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments.” (Miller dalam Tangkilisan, 2007)*

Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Suatu program dikatakan efisien jika program tersebut menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan penggunaan sumber daya sehemat mungkin sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan program. Dapat dikatakan bahwa efisien berarti dalam pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dengan benar, sedangkan efektif adalah jika output yang dihasilkan oleh pelaksanaan program tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup pada pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Pengukuran efektivitas bertujuan agar program tersebut dapat dievaluasi apakah dengan adanya program tersebut telah mampu mencapai suatu tujuan atau tidak

Beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu organisasi yang mana penentuan target sudah ditentukan di awal pelaksanaan program atau kegiatan oleh organisasi.

Efektivitas merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk serta manajemen suatu organisasi atau tidak. Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan dari organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari segi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sedangkan kegiatan tersebut dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Ukuran dari efektivitas merupakan standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas juga menunjukkan sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal.

Untuk mengukur efektivitas program, Gibson dkk dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan kriteria atau ukuran mengenai pencapaian efektif atau tidak suatu program antara lain:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Pembenaran eksistensi suatu program adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pencapaian tujuan program akan lebih jelas, tertib, dan efektif apabila dalam pribadi anggota organisasi telah tertanam kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa tercapainya tujuan program pada dasarnya berarti tercapai pula tujuan mereka secara pribadi. Tujuan dari program ini adalah memotivasi dan mengembangkan perpustakaan desa agar berkelanjutan dalam melayani masyarakat.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi merupakan “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Kejelasan strategi dimaksudkan agar dalam bertindak organisasi tidak tersesat, apabila tersesat berarti hilangnya waktu, tenaga dan biaya dan kemungkinan timbulnya frustrasi. Strategi yang dimaksud adalah cara-cara yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi program pembinaan perpustakaan desa agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang ditetapkan dimana ini berarti kebijakan harus mampu untuk menjembatani tujuan-tujuan tersebut dengan usaha pelaksanaan kegiatan

operasional. Hal yang dimaksudkan disini adalah tindakan-tindakan yang menjebatani untuk mencapai tujuan dengan strategi yang telah dilakukan, jadi kebijakan berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul.

d) Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang merupakan acuan kerja setiap organisasi. Apabila perencanaannya matang akan memungkinkan lancarnya proses kerja yang efektif dan efisien. Karena di dalam perencanaan ada acuan untuk bekerja, dimana perencanaan tersebut tertuang berbagai tujuan dan target, maka rencana dapat dijadikan aspek dasar sebagai acuan pula untuk mengevaluasi hasil kerja. Hal ini berkaitan dengan memutuskan apa yang akan dilakukan saat ini untuk program di masa depan. Sudah jelas yang dimaksudkan adalah hal yang berkaitan dengan kelanjutan program pembinaan perpustakaan untuk ke depannya.

e) Penyusunan program yang tepat

Hal berarti suatu rencana yang baik masih perlu untuk dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, jika tidak maka pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Hal ini berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman kerja dari setiap pekerjaan, termasuk dalam mengelola perpustakaan desa.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia dengan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) khusus perpustakaan desa.

g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Karena sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas program menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian merupakan proses pemantauan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan tujuan. Hal ini berarti adanya peninjauan dan pengawasan dari pihak KPAD kepada perpustakaan desa yang dibina.

Efektivitas memiliki tingkatan yang diungkapkan oleh Gibson dkk (1994:25), efektivitas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Efektivitas individu, merupakan tingkatan efektivitas yang paling dasar yang menekankan pada hasil individu atau anggota tertentu dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok yang lebih menekankan jumlah kontribusi dari semua anggotanya.
- c. Efektivitas organisasi yang merupakan gabungan dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang secara sinergis mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara mengukur efektivitas program, dimana efektivitas program atau kegiatan dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

George Edward III (1980) dalam Mulyono (2009) mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap sebagai *critical independent variables* yang mempengaruhi proses penerapan program atau kebijakan. Keempat variable tersebut adalah:

1. Komunikasi (*communication*): komunikasi merupakan sesuatu yang penting karena program hanya akan terlaksana dengan baik jika jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya (*resources*): meliputi; 1) staf yang cukup (jumlah dan mutunya), (2) informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, (3) kewenangan atau *authority* yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawab, (4) fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi (*disposition*): yaitu sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari suatu kebijakan dan program, terutama adalah aparatur birokrasi.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structura*): yaitu terdapatnya suatu SOP (Standart Operating Procedure) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program.

Pendapat dari peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas dari sebuah program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1996) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Dengan melihat manfaat dan kepuasan peserta terhadap program pembinaan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pembinaan.

#### **1.5.2. Program**

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Dengan adanya program maka segala bentuk dari rencana akan lebih terorganisir dan akan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Program dapat dikatakan sebagai seperangkat kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Agoes dalam Ridhaningrum (2008) yang menyatakan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan, sasaran program dapat tercapai sesuai dengan batas waktu yang ditargetkan

tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Deniston (1988) juga menyatakan bahwa efektivitas program adalah suatu kegiatan atau program yang sebelumnya telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa efektivitas program digunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan suatu program.

Miller dalam Tangkilisan (2007) mengemukakan bahwa:

“Effectiveness be define as the degree to wich a social system achive its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency, efficiency is mainly concerned with goal attainments.” (Miller dalam Tangkilisan, 2007).

Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Sebuah program akan dikatakan efisien jika program tersebut menghasilkan yang seharusnya dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang sehemat mungkin dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan program. Dengan kata lain bahwa efisien berarti dalam pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan benar. Sedangkan efektif berarti apabila output yang dihasilkan oleh pelaksanaan program tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup pada pencapaian tujuan. Dengan kata lain bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dengan mengukur suatu efektivitas program, maka program tersebut dapat dievaluasi apakah dengan adanya program tersebut telah mampu mencapai suatu tujuan atau tidak.

Kunarjo (2002) memaparkan bahwa suatu program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk pencapaian tujuan tertentu. Suatu program memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki titik awal dan titik akhir
2. Sering tidak direncanakan dan tidak memiliki batas waktu penyelesaian
3. Program merupakan satu kesatuan kegiatan yang masing-masing kegiatan saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas program harus memperlihatkan cara-caranya atau proses maupun hasilnya karena program melakukan banyak hal dan kesuksesan program tergantung pula pada prestasi yang memuaskan pada berbagai bidang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk aktivitas atau kegiatan tertentu dalam berbagai bidang.

Pada penelitian ini program yang dimaksudkan adalah program pembinaan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul. Program pembinaan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan program pemerintah yakni kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (BPAD DIY) dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul (KPAD Gunungkidul).

Sesuai dengan yang tertera pada buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (2000) dipaparkan bahwa peningkatan status yang layak bagi perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab bersama antara Perpustakaan nasional RI dan Depdagri. Dalam melaksanakan tugasnya Mendagri melimpahkan wewenangnya pada Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II. Sedangkan Perpustakaan Nasional RI melimpahkan wewenangnya pada perpustakaan Nasional Provinsi dan untuk pengaturan organisasi dan manajemen perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II sesuai dengan Perda yang berlaku. Program pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan kemampuan untuk dapat berperan dalam kegiatan. Tujuan dari program pembinaan perpustakaan desa ini secara garis besarnya Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan Kepres Nomor 67 Tahun 2000 adalah secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu perpustakaan desa/kelurahan, meningkatkan dayaguna dan hasilguna perpustakaan desa/kelurahan. Tujuan khusus dari program pembinaan perpustakaan desa adalah mewujudkan perpustakaan desa/kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, menyelenggarakan program perpustakaan desa/kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, mewujudkan mutu perpustakaan desa/kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, mewujudkan mutu perpustakaan desa/kelurahan yang standar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyediakan berbagai jenis koleksi perpustakaan desa/kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah juga memiliki tujuan dari program pembinaan perpustakaan desa yang dilakukan yakni memotivasi dan mengembangkan perpustakaan desa agar berkelanjutan dalam melayani masyarakat.

Aspek-aspek pembinaan teknis dan non teknis perpustakaan desa/kelurahan meliputi komponen: (1) status, organisasi dan manajemen, (2) ketenagaan, (3) gedung/ruang, (4) perabot dan perlengkapan, (5) koleksi bahan pustaka, (6) pelayanan, (7) pembiayaan (anggaran), (8) promosi dan permasyarakatan, (9) jaringan kerjasama, (10) minat dan kebiasaan membaca seluruh masyarakat yang dilayani. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka program membina perpustakaan desa yakni melakukan stimulasi dalam bentuk barang, adanya bimbingan langsung ke lapangan (perpustakaan desa), adanya bimbingan teknis (Bimtek), serta mengikutsertakan peserta dan kepala desa dalam acara seminar, pelatihan serta workshop yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa diantaranya dalam hal informasi dan teknologi (IT), strategi pengembangan perpustakaan, anggaran untuk tenaga perpustakaan dan tema yang berkaitan mengenai pengembangan perpustakaan desa.

Terkait dengan sumber daya manusia yang dibina di program pembinaan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah salah seorang yang ditunjuk oleh pihak kantor desa setempat untuk mengikuti program pembinaan tersebut, ada yang diambil dari anggota karang taruna, masyarakat biasa, pustakawan minimal D2 perpustakaan dan staf desa sendiri dan terdiri dari dua orang atau lebih.

### 1.5.3. Perpustakaan Desa

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 pada Pasal 1 butir kedua, “perpustakaan desa/kelurahan adalah sebuah sarana penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.” Dengan kata lain perpustakaan merupakan perpustakaan masyarakat sebagai suatu wadah yang mendukung kegiatan belajar masyarakat pedesaan yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Definisi perpustakaan desa dalam buku lain yakni Membina Perpustakaan Desa yang ditulis oleh Sutarno (2008) memaparkan bahwa perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat. Tujuan dari perpustakaan desa adalah memberikan layanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan semua informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi pada semua lapisan masyarakat.

Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dipaparkan bahwa perpustakaan desa berfungsi sebagai media atau sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat karena diselenggarakan dengan tujuan: (1) menunjang program wajib belajar, (2) menunjang program kegiatan seumur hidup bagi masyarakat, (3) menyediakan buku-buku pengetahuan, maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan

masyarakat di berbagai bidang misalnya pertanian (yang produktif), perikanan, peternakan, perindustrian, pengolahan, pemasaran dan lain-lain, (4) menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri, (5) menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan serta menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan, (6) memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam memanfaatkan waktu senggang dengan bacaan ringan / hiburan yang bersifat membangun, serta (7) mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan perpustakaan secara tepat guna dan berhasil guna. Hal-hal lain yang juga yang mencakup perpustakaan adalah tugas pokok dari perpustakaan desa melayani masyarakat dengan menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan perpustakaan untuk melaksanakan fungsinya dengan merekrut tenaga perpustakaan yang memenuhi syarat mental, persyaratan pengetahuan, dan teknik-teknik penyelenggaraan perpustakaan desa yang mencakup kegiatan menata gedung/ruang perpustakaan, mengembangkan koleksi baik melalui pembelian, hibah, tukar menukar dan lain-lain, mengelola bahan pustaka (katalogisasi, klasifikasi, pemasangan label, dan sebagainya), dan memberikan bimbingan kepada masyarakat cara untuk akses mencari informasi dalam koleksi, administrasi peminjaman dan bimbingan terhadap pemustaka. Pada SNP (2011) untuk kulaifikasi dari sumber daya manusia untuk menjadi tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan SLTP dan sederajat dan untuk

kepala perpustakaan desa sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidika SLTA dan yang sederajat.

Hal lain seperti penganggaran perpustakaan desa sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984 yang telah direvisi melalui SK Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2001 tentang pelaksanaan penganggaran penyelenggaran perpustakaan desa berasal dari (1) swadaya masyarakat desa/kelurahan, (2) bantuan pemerintah (APBD/APBN), dan (3) lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian dalam hal sarana dan prasarana, berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk sarana prasarana perpustakaan desa dilihat dari segi: (1) Gedung perpustakaan yang mencakup luas gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m<sup>2</sup> dan memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keselamatan, (2) Lokasi perpustakaan terletak dalam satu gedung dengan kantor desa/kelurahan atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor desa, (3) Ruang Perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi ruang koleksi dan ruang baca, (4) Sarana layanan dan sarana kerja sekurang-kurangnya mencakup: rak buku (3 buah), rak majalah (1 buah), meja baca (4 buah),meja kerja (1 buah), kursi baca (8 buah), perangkat computer (1 unit)

Berdasarkan berbagai pemaparan yang dikemukakan mengenai perpustakaan desa, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa merupakan suatu lembaga informasi yang berada di tingkat desa. Perpustakaan desa adalah perpustakaan milik rakyat, untuk rakyat, dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di sekitarnya dengan mengetahui keinginan dan kemauan

masyarakat serta mengembangkan inisiatif dan kreativitas dari masyarakat desa tersebut.

## 1.6. Definisi Konseptual dan Operasional

### 1.6.1. Definisi Konseptual

#### 1) Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan tingkat keberhasilan suatu program dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran program tersebut. Untuk mengukur suatu efektivitas program, maka dapat diukur melalui:

1. Kejelasan Tujuan: Suatu proses pencapaian tujuan akhir yaitu memotivasi dan mengembangkan perpustakaan desa agar terus dapat melayani masyarakat.
2. Kejelasan Strategi: kejelasan cara-cara KPAD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai agar tidak menghabiskan waktu, biaya dan tenaga.

#### 3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang menjembatani pencapaian tujuan dengan strategi yang dilakukan KPAD

4. Perencanaan yang Matang: Berkaitan dengan perumusan apa saja yang akan diputuskan untuk mencapai tujuan program pembinaan perpustakaan desa di masa depan.

5. Penyusunan Program yang Tepat: Memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana: Kemampuan bekerja secara produktif ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian: proses pemantauan dari kegiatan-kegiatan program pembinaan perpustakaan desa yang dilakukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan tujuan.

## 2) Program Pembinaan Perpustakaan Desa

Program pembinaan perpustakaan desa merupakan program kerjasama pemerintah dari Perpunas, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul (KPAD) guna memotivasi dan mengembangkan perpustakaan desa agar dapat terus melayani kebutuhan informasi masyarakat. KPAD mendapat wewenang dalam melakukan program pembinaan segala jenis perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, termasuk perpustakaan desa dalam membina secara teknis dan non teknis.

### 3) Perpustakaan Desa

Di dalam Standar Nasional Perpustakaan (2011) menyatakan bahwa perpustakaan desa adalah salah satu lembaga informasi yang berada di desa. Perpustakaan yang merupakan milik rakyat, untuk rakyat, dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di sekitarnya dengan mengetahui keinginan dan kemauan masyarakat serta mengembangkan inisiatif dan kreativitas dari masyarakat desa tersebut.

#### 1.6.2. Definisi Operasional

Untuk melihat efektivitas program dapat dilihat melalui:

##### 1 Kejelasan Tujuan

Untuk mengukur kejelasan tujuan program pembinaan perpustakaan desa dapat dilihat dari:

- ✓ Peserta mengetahui tujuan program pembinaan perpustakaan desa
- ✓ Adanya dorongan mengembangkan perpustakaan setelah mengetahui tujuan program pembinaan perpustakaan desa
- ✓ Menumbuhkan rasa semangat mengembangkan perpustakaan dengan adanya stimulasi barang
- ✓ Mendapat kesempatan mengembangkan diri setelah mendapat bimbingan langsung, bimtek, pelatihan, seminar dan workshop

- ✓ Lebih banyak belajar mengelola koleksi setelah mendapat bimbingan langsung mengolah koleksi
- ✓ Semakin tertarik megembangkan perpustakaan setelah mendapat bimtek, pelatihan, dan workshop
- ✓ Semakin semangat membenahi perpustakaan dengan adanya lomba perpustakaan desa

## 2 Kejelasan Strategi

Untuk mengukur kejelasan strategi dapat dilihat dari:

### a) Pengenalan Perpustakaan Desa

Indikator pengenalan perpustakaan desa dapat dilihat dari:

- ✓ Pengenalan program pembinaan perpustakaan desa
- ✓ Waktu pengenalan program pembinaan perpustakaan desa
- ✓ Media pengenalan perpustakaan desa (leaflet, brosur, poster, banner, plang, dan lain-lain)
- ✓ Pelaksana pengenalan perpustakaan desa

### b) Pemberian informasi program pembinaan perpustakaan desa

Indikator dari pemberian informasi program pembinaan perpustakaan desa dapat dilihat dari:

- ✓ Adanya informasi jenis stimulasi barang
- ✓ Adanya informasi jadwal stimulasi barang datang
- ✓ Adanya informasi jadwal pelaksanaan BIMTEK, bimbingan langsung, pelatihan, seminar serta workshop

- ✓ Adanya informasi jadwal lomba perpustakaan desa

### 3 Proses analisis dan Perumusan kebijaksanaan

Untuk mengukur proses analisis perumusan kebijaksanaan dapat dilihat dari

- ✓ Kesesuaian program pembinaan dan pelatihan dengan tujuan program pembinaan perpustakaan desa
- ✓ Adanya kerjasama KPAD dengan pihak lain (Perpusnas, BPAD, PerpusSeru, Cola cola Foundation Indonesia, dan lainnya)
- ✓ Perpustakaan desa juga melakukan kerjasama dengan pihak lain
- ✓ Ketertarikan terhadap perpustakaan melalui pemateri yang bekerjasama dengan pihak KPAD
- ✓ Keinginan mengembangkan perpustakaan dengan daya tarik hadiah lomba perpustakaan
- ✓ Keinginan membenahi perpustakaan setelah melihat perpustakaan desa yang lebih maju

### 4 Perencanaan yang Matang

- a. Kelanjutan program pembinaan perpustakaan desa
- b. Bentuk kelanjutan program pembinaan perpustakaan desa yang diterima

## 5 Penyusunan Program

Penyusunan program dapat dilihat dari:

- ✓ Adanya pedoman kerja yang diberikan oleh pihak KPAD (prosedur pelayanan, pengolahan, dan lainnya)
- ✓ Bentuk pedoman kerja yang diberikan
- ✓ Bentuk pedoman yang dibutuhkan

## 6 Tersedianya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dilihat dari:

- ✓ Letak gedung perpustakaan strategis
- ✓ Gedung perpustakaan permanen
- ✓ Sarana layanan dan kerja memadai

## 7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian

- a. Kegiatan pemantauan stimulasi barang
  - ✓ Membuat daftar barang datang
  - ✓ Ketepatan waktu datangnya barang
- b. Kegiatan peninjauan setelah program pembinaan secara berkala
  - ✓ Intensitas (keaktifan) peninjauan setelah pembinaan
  - ✓ Cara peninjauan (langsung dan tidak langsung)
  - ✓ Peninjauan sebelum mengikuti lomba perpustakaan desa
  - ✓ Peninjauan setelah mengikuti lomba perpustakaan desa
  - ✓ Pelaksana peninjauan

## **1.7. Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.7.1. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif. Dimana penulis menggambarkan secara keseluruhan mengenai efektivitas program pembinaan Perpustakaan Desa. Penelitian deskriptif mempelajari situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena pada penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Hasan, 2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program pembinaan Perpustakaan Desa oleh Perpustakaan Daerah Wonosari.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat untuk diteliti tentang efektivitas program pembinaan perpustakaan desa di wilayah kabupaten Gunungkidul yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ini adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Gunung Kidul dengan pertimbangan:

1. Wilayah geografis Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar terdiri dari bukit yang jarak jangkauan dari desa-desa ke perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Gunung Kidul relatif jauh. Bukan hanya jarak jangkauan ke perpustakaan kota yang jauh, tetapi jarak

antara rumah warga dengan kantor desa yang merupakan sebagian besar dari tempat perpustakaan desa berada, juga relatif jauh sehingga mempengaruhi kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa.

2. Jumlah personil dan armada untuk menjangkau ke setiap pelosok desa tidak sebanding dengan jumlah desa yang akan dilayani.
3. Sejak tahun 2008 melakukan program pembinaan perpustakaan desa, tetapi tidak hanya pembinaan perpustakaan desa saja melainkan pembinaan terhadap perpustakaan komunitas, perpustakaan tempat ibadah dan perpustakaan sekolah di wilayah Gunung Kidul.
4. Heterogenya karakteristik dari lokasi penelitian, mata pencaharian masyarakat Gunungkidul yang mayoritas petani berbeda dengan masyarakat kota, sehingga peneliti juga memasukkan perpustakaan desa yang berada di tengah kota sampai perpustakaan yang berada di pelosok desa.

### **1.7.3. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, sebelumnya harus mengetahui siapa yang akan menjadi subyek penelitian, hal ini akan membantu dalam mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi atau *universe* merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang nantinya akan diteliti (Hasan, 2002). Sejalan dengan pendapat Arikunto (1999) yang mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perpustakaan desa yang tersebar di

Kabupaten Gunung Kidul yang berjumlah 114 perpustakaan desa. Untuk menentukan jumlah subjek yang akan diteliti maka untuk populasi perpustakaan desa akan digunakan teknik sampel.

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik sampling akan digunakan karena besarnya objek penelitian dan adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan suatu penelitian terhadap keseluruhan objek penelitian (Hasan, 2002). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*). Prinsip dari penarikan sampel ini adalah setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini cara yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan lotere (mengundi) (Eriyanto, 2007). Caranya dimulai dari mencatat terlebih dahulu anggota populasi dan memberikan nomor, yakni seluruh perpustakaan desa yang ada di daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah mendapat bantuan. Populasi yang tercatat adalah sejumlah 114 perpustakaan desa, kemudian membuat gulungan kertas dengan disertai nomor 1 hingga 114, teknik mengundi yang digunakan adalah dengan mengambil kertas dengan mata tertutup dan nomor yang terambil dicocokkan dengan daftar nama perpustakaan desa yang sudah dibuat sebelumnya dan perpustakaan desa itulah yang terpilih menjadi sampel penelitian.

Sampel penelitian yang dihasilkan dari jumlah populasi adalah 75 perpustakaan desa karena sudah dianggap mewakili dari seluruh populasi yang tersedia dan 75 perpustakaan desa tersebut adalah Desa Wonosari yakni Perpustakaan

Desa Caraka dan Nur'aini, Desa Duwet, Desa Kepek. Desa Piyaman, Desa Mulo, Desa Wunung, Desa Siraman, Desa Ngeloro, Desa Kepek, Desa Karangrejek, Desa Selang, Desa Bejiharjo yakni Bejo dan Khazanah Info, Desa Jatiayu, Desa Ngipak, Desa Bendungan, Desa Wiladeg, Desa Karangmojo, Desa Tepus, Desa Gedangrejo, Desa Ngawis, Desa Pundungsari, Sumberejo, Desa Bendung, Desa Candirejo, Desa Rejosari, Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Planjan, Desa Genjahan, Desa Krambilawit, Desa Sumbergiri, Desa Tabakromo, Desa Bedoyo, Desa Kenteng, Desa Ponjong, Desa Umbulrejo, Desa Semanu, Desa Ngeposari, Desa Candirejo, Desa Pacarejo, Desa Kemadang, Desa Ngelindur, Desa Kemiri, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Hargosari, Desa Girisekar, Desa Girimulyo, Desa Girisuko, Desa Giriharjo, Desa Pampang, Desa Mulusan, Desa Sodo, Desa Karangduwet, Desa Giring, Desa Gading, Desa Playen, Desa Plembutan, Desa Bleberan, Desa Banyusuko, Desa Katongan, Desa Dengok, Desa Ngawu, Desa Bandung, Desa Logandeng, Desa Banaran, Desa Ngeri, Desa Kampung, Desa Ngelipar, Desa Sambirejo, Desa Tancep dan Desa Kedungkeris.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1.7.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data primer, yaitu dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui pengisian kuisioner langsung oleh

responden. Kuisisioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku (Hasan,2002). Data primer pada penelitian ini adalah pengelola perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. pengumpulan data primer dihimpun dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara. Kuisisioner Dalam penelitian ini kuisisioner dibuat dengan pertanyaan tertutup, sehingga tidak memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban lain. Kuisisioner dengan pertanyaan tertutup adalah berbentuk kuisisioner yang dilengkapi dengan sejumlah alternative/kategori jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban.

#### 1.7.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kedua sumber atau sumber data yang kita cari atau butuhkan (Bungin,2005). Pengumpulan data sekunder yaitu diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu. Data-data yang menunjang dalam penelitian ini diperoleh dari internet, pustakawan-pustakawan yang terlibat dalam proses pelaksanaan program pembinaan perpustakaan desa serta dari kepala desa dari perpustakaan desa yang telah dipilih oleh peneliti, guna mengetahui tentang responden dan tentang hal-hal yang akan diteliti.

#### 1.7.4.3. Observasi

Pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada responden dengan cara datang ke semua perpustakaan desa yang telah dipilih oleh peneliti untuk lebih mengetahui responden dan keadaan nyata perpustakaan desa yang telah dibina.

#### 1.7.4.4. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan berasal dari penelitian terdahulu, buku, jurnal yang berkaitan dengan efektivitas, orasi ilmiah dan media online.

### **1.8. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1.8.1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam rangka memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Dalam Hasan (2002), Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data sebagai berikut:

##### 1) Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Kekurangan data atau kesalahan data dapat

dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

## 2) Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada setiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Alat yang digunakan dalam pemberian kode yaitu SPSS. Tujuan coding dalam penelitian ini adalah memudahkan pengelompokan data berdasarkan criteria tertentu. Manfaat dari coding yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### I. Karakteristik responden

#### a. Kode Jenis Kelamin

**Tabel I.1. Kode Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Kode
Laki-laki	1
Perempuan	2

#### b. Kode Umur

**Tabel I.2. Kode Umur**

Umur	Kode
21-25	1
26-30	2
31-35	3

36-40	4
41-45	5
46-50	6
51-55	7
56-60	8

## II. Efektivitas

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena social spesifik), seperti sikap, pendapat dan persepsi social seseorang atau kelompok orang (Hasan,2002). Variabel penelitian ini diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel yang dimodifikasi untuk menentukan jawaban yang diangkat dengan skor 1 sampai dengan 4, yaitu dengan sistem jawaban sebagai berikut:

**Tabel I.3. Kode Kriteria Jawaban**

<b>Klasifikasi Skoring</b>	<b>Kode</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

### 3) Tabulating

Tabulating adalah membuat table-table yang berisikan data yang telah diberi kode, sesuai dengan analisi yang dibutuhkan. Pembuatan tabel dilakukan dengan tabulasi langsung karena data langsung dipindahkan dari kuisioner ke kerangka tabel yang telah

disiapkan tanpa proses perantara lainnya. Alat yang digunakan dalam tabulasi yaitu SPSS.

Tabel frekuensi dalam penelitian ini menunjukkan banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian, yaitu karakteristik responden dan pertanyaan-pertanyaan tentang efektivitas program pembinaan perpustakaan desa, kemudian data pada tabel akan dianalisis secara deskriptif.

Untuk menemukan rata-rata (mean) dalam suatu daftar dari setiap item pertanyaan, maka terlebih dahulu menemukan interval kelasnya dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{r}{k}$$

Keterangan:

I = interval

r = range (wilayah) = rangan tertinggi – skala terendah

k= jumlah kelas

Maka mendapatkan nilai:

$$I = (4-1) : 4 = 0,75$$

Berdasarkan perhitungan interval di atas maka menghasilkan karakteristik penilaian rata-rata efektivitas yaitu:

Tabel I.4. Karakteristik Penilaian Efektivitas

Skala	Penilaian terhadap efektivitas
3,28 – 4,03	Sangat Efektif
2,52 – 3,27	Cukup Efektif
1,76 – 2,51	Tidak Efektif
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Efektif

### 1.8.2. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, data kuantitatif yang sudah diolah melalui program SPSS 20 akan dianalisis dan diinterpretasikan secara teoritik. Data-data kuantitatif disini berupa kuisioner yang telah diolah menjadi tabel serta wawancara probing dengan beberapa responden pada saat turun lapangan. Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh data yang valid untuk diperoleh suatu gambaran lebih jelas tentang permasalahan dalam penelitian efektivitas program pembinaan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.